

KLIPING BERITA KEGIATAN KONSULTASI RUU DESA	
Nama Media	MEDAN BISNIS
Edisi	Selasa, 4 Maret 2008
Rubrik	Sosial Politik
Halaman	III

RUU Desa Diharap Pertegas Otonomi Desa

■ *zainul abdi*

MedanBisnis – Medan

Rancangan UU Desa yang drafnya kini masih dalam tahap penggodokan di Depdagri diharapkan dapat mempertegas otonomi desa, baik soal kedudukan maupun kewenangannya.

UU Desa juga telah lama ditunggu banyak kalangan yang selama ini melihat kondisi desa yang terus menerus menjadi objek kebijakan lembaga supra desa, yang akhirnya berujung pada ketidakberdayaan masyarakat desa.

Demikian disampaikan Irjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri, Eko Prasetyo, pada acara konsultasi publik RUU Desa yang digelar IRE dan PMD, Depdagri, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemprosu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Senin (3/3), di Hotel Madani, Medan.

Eko menyebutkan, UU Desa sangat diperlukan. Alasannya, desa dapat dilihat dari sudut historis, filosofis, yuridis, sosiologis dan psikopolitik. Secara historis desa merupakan basis masyarakat, baik dilihat dari SDM maupun SDA dan basis kearifan lokal.

"Kita ketahui di Indonesia ada 65.000 desa. Namun kondisinya sangat terbelakang dari susunan pemerintahan. Dalam mendorong pembangunan desa, masih dilakukan setengah hati," imbuhnya. ●